

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi.

##### 2.1.2 Karakteristik Ekonomi Pedesaan

Desa sebagai daerah belakang (*hinterland*) memiliki wilayah yang relatif luas, jumlah kepadatan penduduk rendah, biasanya mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian atau sektor perikanan pada desa di tepi laut, memiliki tingkat produktivitas dan tingkat kesejahteraan penduduk lebih rendah, namun merupakan suplai bahan pangan, bahan baku industri, dan tenaga kerja untuk daerah perkotaan (Adisasmita, 2006). Karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan (Bintarto, 1977):

1. Ketergantungan kepada kota dalam hal pemasaran dan modal
2. Lapangan kerja utama disektor pertanian dan pengolahan hasil dari pertanian
3. Teknologi sederhana, skala kecil dan menengah, permasalahan modal dan pemasaran.

##### 2.1.3 Penggunaan Lahan di Wilayah Pedesaan

Menurut Sadyohutomo (2006), terdapat 12 bentuk penggunaan lahan pedesaan di Indonesia yang terdiri dari:

1. Perkampungan

Areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan untuk tempat tinggal penduduk dan dihuni secara menetap

2. Industri  
Areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi.
3. Persawahan  
Areal pertanian dari petak-petak pematang yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, palawija, tembakau dan tanaman semusim lainnya.
4. Pertanian Tanah Kering Semusim  
Areal tanah pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami tanaman umur pendek berupa tegalan atau ladang.
5. Kebun  
Areal tanah yang ditanami satu jenis tanaman keras atau tanaman keras dengan tanaman semusim dan tidak jelas tanaman apa yang menonjol.
6. Perkebunan  
Areal tanah yang ditanami tanaman keras dengan satu jenis tanaman yang dominan yang mencakup perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
7. Padang  
Areal tanah yang hanya ditumbuhi tanaman rendah dari keluarga rumput dan semak.
8. Pertambangan  
Areal tanah yang dieksploitasi bagi pengambilan atau penggalian bahan-bahan tambang yang dilakukan secara terbuka atau tertutup.
9. Hutan  
Areal tanah yang ditumbuhi pepohonan yang tajuk pohonnya saling menutupi atau bergesekan.
10. Perairan Darat  
Areal tanah yang digenangi air tawar secara permanen baik buatan maupun alamiah.
11. Tanah Terbuka  
Areal tanah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak digarap karena tidak subur dan menjadi subur setelah digarap.

## 12. Lain-lain

Areal tanah yang dipergunakan seperti jalan, sungai, bendungan serta saluran yang merupakan buatan manusia maupun alami.

## 2.2 Pertanian

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (UU No 19 Tahun 2013). Menurut Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Kawasan sentra produksi pangan memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1 Tipologi Kawasan Sektor Usaha Pertanian**

No.	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi Kawasan	Persyaratan Agroklimat
1.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan yang datar, memiliki sarana pengairan (irigasi) yang memadai.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
2.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan datar dan berbukit, dan tersedia sumber air yang memadai.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
3.	Perkebunan	Dataran tinggi, dengan tekstur lahan berbukit, dekat dengan kawasan konservasi alam.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
4.	Peternakan	Dekat kawasan pertanian dan perkebunan, dengan sistem sanitasi yang memadai.	Lokasi tidak boleh berada dipermukiman dan memperhatikan aspek adaptasi lingkungan.
5.	Perikanan Darat	Terletak pada kolam perikanan darat, tambak, danau alam dan danau buatan, daerah aliran sungai baik dalam bentuk keramba maupun tangkapan alam.	Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
6.	Perikanan Laut	Daerah pesisir pantai hingga lautan dalam hingga batas wilayah zona. Ekonomi eksklusif perairan NKRI.	Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
7.	Agrowisata	Pengembangan usaha pertanian dan perkebunan yang disamping tetap berproduksi dikembangkan menjadi kawasan wisata alam tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian produktif.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
8.	Hutan Wisata Konservasi Alam	Kawasan hutan lindung dikawasan tanah milik negara, kawasan ini biasanya berbatasan langsung dengan kawasan lahan pertanian dan perkebunan dengan tanda batas wilayah yang jelas.	Sesuai dengan karakteristik lingkungan alam wilayah konservasi hutan setempat.

Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, 2011

### 2.2.1 Agribisnis

Menurut Permentan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang. Menurut Saragih (2001), Agribisnis merupakan sistem usaha pertanian yang dilaksanakan tidak hanya secara subsistem melainkan dalam satu sistem yang berorientasi komersial atau usaha bisnis pertanian dengan orientasi keuntungan.

Upaya yang dapat ditempuh agar dapat meningkatkan pendapatan usaha tani adalah dengan penerapan konsep pengembangan sistem agribisnis terpadu, yaitu apabila sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan dan pemasaran dikembangkan melalui manajemen agribisnis yang baik dan dalam satu sistem yang utuh dan terkait. (Said et al., 2001). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Andriani (2007), dimana pendekatan agribisnis dalam pembangunan pertanian akan memperoleh hasil yang maksimal apabila telah ada mekanisme keterpaduan antara pembangunan pertanian pendekatan agribisnis dan pembangunan wilayah secara umum, sehingga dihasilkan satu sinergi yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional (Andriani, 2007). Subsistem agribisnis yang ada (Permentan Nomor 06 Tahun 2015, Saragih 2001, Said, et al., 2001), terdiri dari:

1. Subsistem Hulu (*upstream agribusiness*) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit.
2. Subsistem Pertanian Primer / usaha tani (*on-farm agribusiness*) adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan.
3. Subsistem Agribisnis Hilir (*down-stream agribusiness*) adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan

serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya.

4. Subsistem penunjang adalah seluruh kegiatan yang menyediakan jasa penunjang untuk agribisnis, seperti permodalan, teknologi, lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan lain-lain.

### 2.2.2 Sumber Daya Alam Pertanian

Manusia mengembangkan suatu sistem pengetahuan tertentu yang mengarah pada pembentukan pola pengelolaan lahan yang disertai dengan berbagai upaya konservasi dalam rangka mempertahankan sumberdaya alam dan mencari keselarasan dengan alam (Mulyoutami et al, 2004). Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri (Fauzi, 2004). Pengelolaan sumber daya alam dapat diketahui dengan cara penggalian informasi kepada petani, seperti berdasarkan Mulyoutami et al (2004) bahwa penggalian informasi mengenai pengetahuan lokal masyarakat dan inovasi yang diadopsi oleh petani dapat menggambarkan pola pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya.

Pengelolaan lahan pertanian yang belum optimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan manusia yang kurang handal termasuk kurangnya teknologi dan investor. Penggunaan SDA dan peranan yang dimainkannya dalam meningkatkan standar hidup, tergantung antara lain pada bentuk penyesuaian diri manusia atas alam sekitarnya yaitu perubahan teknologi. Seperti halnya di Negara-negara sedang berkembang, umumnya sumber-sumber daya alam belum banyak digunakan, karena kurangnya pengetahuan teknik. Termasuk dalam kaitan ini adalah penguasaan teknologi untuk tujuan inventarisasi SDA dan penyusunan neraca SDA dan lingkungan yang sangat berperan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan (Amir S dan Rija S, 2007). Kendala pengelolaan sumber daya alam juga terkait dengan faktor sosial budaya, dimana dalam masyarakat pra-industri (belum mengalami kegiatan industri) misalnya, masyarakat itu dipandang oleh penduduknya sebagai sesuatu yang misterius dan belum dapat dimengerti. Kebutuhan-kebutuhan akan materi terbatas pada kebutuhan yang pokok. Dalam kebudayaan semacam itu manusia belum berfikir untuk menggunakan atau

mengeksploitasi sumber-sumber alam yang ada. Sebaliknya dalam masyarakat industri atau yang telah maju, sikap masyarakat itu adalah agresif dan ingin menguasai alam (Amir S, et al, 2007).

Selain petani sebagai aktor utama, para aktor pendukung dari berbagai instansi pemerintah dan organisasi atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Para aktor pendukung yang merupakan aktor luar tersebut berperan memberikan input inovasi berupa pengetahuan baru maupun pengembangan pengetahuan lokal yang telah ada (Mulyoutami et al, 2004).

Pengelolaan sumber daya alam untuk kegiatan pertanian disesuaikan dengan kesesuaian lahan yang ada. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian sebidang lahan untuk pengembangan suatu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang berbasis lahan. Tingkat kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terain (topografi, lereng dan elevasi) (Permen Pertanian No.41/Permentan/OT.140/9/2009). Tipologi lahan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.2 Tipologi Lahan Berdasarkan Kesesuaian lahan dan Persyaratan Agroklimat**

No.	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
1.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (Iereng <8%), kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana inigasi untuk pengembangan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
2.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, dan tersedia sumber air yang cukup.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
3.	Perkebunan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
4.	Peternakan	Dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup. Tidak berada di permukiman dan memperhatikan aspek lingkungan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat

**Keterangan :**

S1 = lahan sangat sesuai,

S2 = lahan cukup sesuai.

S3 = sesuai marginal.

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim (Sofyan et al,

2007). Karakteristik lahan tersebut (terutama topografi dan tanah) merupakan unsur pembentuk satuan peta tanah. Tiga faktor utama karakteristik lahan pertanian terdiri sebagai berikut (Sofyan et al, 2007):

#### A. Topografi

Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari. Ketinggian tempat diukur dari permukaan laut (dpl) sebagai titik nol. Dalam kaitannya dengan tanaman, secara umum sering dibedakan antara dataran rendah (<700 m dpl.) dan dataran tinggi (> 700 m dpl.). Namun dalam kesesuaian tanaman terhadap ketinggian tempat berkaitan erat dengan temperatur dan radiasi matahari. Semakin tinggi tempat di atas permukaan laut, maka temperatur semakin menurun. Demikian pula dengan radiasi matahari cenderung menurun dengan semakin tinggi dari permukaan laut. Ketinggian tempat dapat dikelaskan sesuai kebutuhan tanaman.

#### B. Iklim

##### 1. Suhu udara

Pada daerah yang data suhu udaranya tidak tersedia, suhu udara diperkirakan berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu udara rata-ratanya dan hubungan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Braak (1928):

$$26,3\text{ C} (0,01 \times \text{elevasi dalam meter} \times 0,6\text{ C}) \dots\dots\dots (2-1)$$

Suhu udara rata-rata di tepi pantai berkisar antara 25-27 C.

##### 2. Curah hujan

Data curah hujan diperoleh dari hasil pengukuran stasiun penakar hujan yang ditempatkan pada suatu lokasi yang dianggap dapat mewakili suatu wilayah tertentu. Oldeman (1975) mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan >200 mm, sedangkan bulan kering mempunyai curah hujan <100 mm. Kriteria ini lebih diperuntukkan bagi tanaman pangan, terutama untuk padi. Berdasarkan kriteria tersebut Oldeman (1975) membagi zone agroklimat ke dalam 5 kelas utama (A, B, C, D dan E).

### C. Tanah

Faktor tanah dalam evaluasi kesesuaian lahan ditentukan oleh beberapa sifat atau karakteristik tanah di antaranya drainase tanah, tekstur, kedalaman tanah dan retensi hara (pH, KTK), serta beberapa sifat lainnya diantaranya alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan.

#### 1. Drainase tanah

Drainase tanah menunjukkan kecepatan meresapnya air dari tanah atau keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air. Karakteristik kelas drainase tanah untuk evaluasi lahan dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3 Karakteristik kelas drainase tanah untuk evaluasi lahan**

No.	Kelas Drainase	Uraian
1	Cepat ( <i>excessively drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan; yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
2	Agak cepat ( <i>somewhat excessively drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya cocok untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan; yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
3	Baik ( <i>well drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan daya menahan air sedang; lembab; tapi tidak cukup basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan; yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 100 cm.
4	Agak baik ( <i>moderately well drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang sampai agak rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah; tanah basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan; yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 50 cm.
5	Agak terhambat ( <i>somewhat poorly drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai sangat rendah; tanah basah sampai ke permukaan. Ciri yang dapat diketahui di lapangan; yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 25 cm.
6	Terhambat ( <i>poorly drained</i> )	Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai sangat rendah; tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan.
7	Sangat terhambat ( <i>very poorly drained</i> )	Tanah dengan konduktivitas hidrolik sangat rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) sangat rendah; tanah basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan.

Sumber: Sofyan et al, 2007

#### 2. Tekstur

Tekstur merupakan komposisi partikel tanah halus (diameter 2 mm) yaitu pasir, debu dan liat. Tekstur dapat ditentukan di lapangan seperti disajikan pada **Tabel 2.4**. Pengelompokan kelas tekstur adalah:

Halus (h)	Liat berpasir, liat, liat berdebu
Agak halus (ah)	Lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu
Sedang (s)	Lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung berdebu, debu
Agak kasar (ak)	Lempung berpasir
Kasar (k)	Pasir, pasir berlempung
Sangat halus (sh)	Liat

**Tabel 2.4 Menentukan kelas tekstur di lapangan**

No	Kelas Tekstur	Sifat Tanah
1.	Pasir (S)	Sangat kasar sekali; tidak membentuk gulungan; serta tidak melekat.
2.	Pasir berlempung (LS)	Sangat kasar; membentuk bola yang mudah sekali hancur; serta agak melekat.
3.	Lempung berpasir (SL)	Agak kasar; membentuk bola yang mudah sekali hancur; serta agak melekat.
4.	Lempung (L)	Rasa tidak kasar dan tidak licin; membentuk bola teguh; dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat; dan melekat.
5.	Lempung berdebu (SiL)	Licin; membentuk bola teguh; dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat; serta agak melekat.
6.	Debu (Si)	Rasa licin sekali; membentuk bola teguh; dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat; serta agak melekat.
7.	Lempung berliat (CL)	Rasa agak kasar; membentuk bola agak teguh (lembab); membentuk gulungan tapi mudah hancur; serta agak melekat.
8.	Lempung liat berpasir (SCL)	Rasa kasar agak jelas; membentuk bola agak teguh (lembab); membentuk gulungan tetapi mudah hancur; serta melekat.
9.	Lempung liat berdebu (SiCL)	Rasa licin jelas; membentuk bola teguh; gulungan Mengkilat; melekat.
10.	Liat berpasir (SC)	Rasa licin agak kasar; membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin; mudah digulung; serta melekat.
11.	Liat berdebu (SiC)	Rasa agak licin; membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin; mudah digulung; serta melekat.
12.	Liat (C)	Rasa berat; membentuk bola sempurna; bila kering sangat keras; basah sangat melekat.

Sumber: Sofyan et al, 2007

### 3. Bahan kasar

Bahan kasar adalah persentasi kerikil, kerakal atau batuan pada setiap lapisan tanah, dibedakan menjadi:

sedikit	: < 15 %
sedang	: 15 - 35 %
banyak	: 35 - 60 %
sangat banyak	: > 60 %

## 4. Kedalaman tanah, dibedakan menjadi:

sangat dangkal	: < 20 cm
dangkal	: 20 - 50 cm
sedang	: 50 - 75 cm
dalam	: > 75 cm

## 5. Ketebalan gambut, dibedakan menjadi:

tipis	: < 60 cm
sedang	: 60 - 100 cm
agak tebal	: 100 - 200 cm
tebal	: 200 - 400 cm
Sangat tebal	: > 400 cm

## 6. Alkalinitas

Menggunakan nilai persentase natrium dapat ditukar (exchangeable sodium percentage atau ESP).

## 7. Bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan kondisi lapangan, yaitu dengan cara memperhatikan adanya erosi lembar permukaan (sheet erosion), erosi alur (rill erosion), dan erosi parit (gully erosion). Pendekatan lain untuk memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif lebih mudah dilakukan adalah dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun, dibandingkan tanah yang tidak tererosi.

**Tabel 2.5 Tingkat bahaya erosi**

Tingkat bahaya erosi	Tanah permukaan yang hilang (cm/tahun)
Sangat ringan (sr)	< 0.15
Ringan (r)	0.15 – 0.9
Sedang (s)	0.9 – 1.8
Berat (b)	1.8 – 4.8
Sangat berat (sb)	> 4.8

Sumber: Sofyan et al, 2007

## 8. Bahaya banjir/genangan

Banjir ditetapkan sebagai kombinasi pengaruh dari: kedalaman banjir (X) dan lamanya banjir (Y). Kedua data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan penduduk setempat di lapangan. Bahaya banjir dengan simbol  $F_{x,y}$ , (dimana x adalah simbol kedalaman air genangan, dan y adalah lamanya banjir) disajikan dalam **Tabel 2.6**.

**Tabel 2.6 Kelas bahaya banjir**

Simbol	Kelas bahaya banjir	Kedalaman banjir (x) (cm)	Lama banjir (y) (bulan/tahun)
F0	Tidak ada	dapat diabaikan	Dapat diabaikan
F1	Ringan	<25	<1
		25-50	<1
		50-150	<1
F2	Sedang	<25	1-3
		25-50	1-3
		50-150	1-3
		>150	<1
F3	Agak berat	<25	3-6
		25-50	3-6
		50-150	3-6
F4	Berat	<25	>6
		25-50	>6
		50-150	>6
		>150	1-3
		>150	3-6
		>150	>6

Sumber: Sofyan et al, 2007

#### 9. Kemasaman tanah

Ditentukan atas dasar pH tanah pada kedalaman 0-20 cm dan 20-50 cm. Nilai kelas kemasaman berdasarkan pH tanah dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.7 Kelas kemasaman (pH) tanah**

Kelas	pH tanah
Sangat masam	< 4.5
Masam	4.5 – 5.5
Agak masam	5.6 – 6.5
Netral	6.6 – 7.5
Agal alkalis	7.6 – 8.5
Alkalis	> 8.5

Sumber: Sofyan et al, 2007

### 2.2.3 Sarana dan Prasarana Pertanian

Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan perdesaan berbasis pertanian dalam artian luas (termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan menempatkan 'kota-tani' sebagai pusat kawasan dan ketersediaan sumber dayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agribisnis antar desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya (Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011).

Infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan (agropolitan), yang meliputi:

1. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran aliran barang masuk dari kota ke

kawasan sentra produksi pangan dan sebaliknya, seperti bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, vaksin ternak. Jenis dukungan sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. Jalan penghubung antar desa-kota
  - b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi pertanian)
  - c. Tempat bongkar muat Saprotan
2. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani atau pertanian primer (*on-farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana yang terdiri dari:
- a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa *hinterland* maupun antar desa *hinterland* yang menjadi pemasok hasil pertanian
  - b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
  - c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan dan tambatan perahu pada kawasan budi daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
  - d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*
3. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
- a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.
  - b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
  - c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk food service, seperti pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar supermarket, aero catering, dan lain-lain.
  - d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
  - e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).

- f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis.
- g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkar desa yang menghubungkan beberapa desa hinterland.

#### **2.2.4 Sosial Ekonomi pertanian**

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial (Arikunto, 2006). Sementara istilah ekonomi secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Arikunto, 2006). Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Arikunto, 2006).

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimiliki. Status sosial ekonomi menurut Soekanto (2007) berarti suatu kedudukan individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Menurut Mubyarto (1990), sosial ekonomi terkait pertanian dipandang sebagai ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi pertanian yaitu tataniaga, ekonomi produksi pertanian dan lain-lain.

Faktor sosial-ekonomi pertanian sangat berkaitan dengan jumlah pendapatan petani sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui peningkatan produksi. Karakteristik sosial ekonomi petani relatif banyak dan beragam (Tohir,1991; Stanton, 1993; Helmi, 2009, Andikal dan Brotosunaryo, 2013), seperti (1) jenis benih yang digunakan, (2) jumlah tenaga kerja yang digunakan, (3) banyaknya pupuk dan pestisida yang digunakan, (4) tingkat pengetahuan dan keterampilan petani atau tingkat teknologi, dan (5) modal yang tersedia, termasuk (6) pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Berikut merupakan beberapa karakteristik sosial-ekonomi pertanian yang akan dibahas pada penelitian ini:

### **A. Permodalan**

Modal di dalam kegiatan produksi pertanian dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relatif pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang (Soekartawi, 2003). Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Menurut Tohir (1983), Tanah bukan termasuk faktor produksi modal, tetapi masuk faktor alam yang memiliki nilai modal dengan berbagai pertimbangan seperti tanah tidak dapat dipindah-pindahkan, tanah selalu terikat dengan iklim dan tanah tidak mudah diperbanyak.

Faktor produksi modal sering diartikan sebagai uang atau keseluruhan nilai dari sumber-sumber ekonomi non manusiawi (Mubyarto, 1994). Sering juga modal diartikan sebagai semua barang dan jasa yang sudah di investasikan dalam bentuk bibit, obat-obatan, alat-alat pertanian dan sumbangan faktor produksi tanah dalam proses produksi pertanian yaitu berupa unsur-unsur hara yang terkandung di dalamnya yang menentukan tingkat kesuburan suatu jenis tanah. Faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dalam produksi pertanian adalah manajemen pertanian yang berfungsi mengkoordinir faktor-faktor produksi lainnya agar dapat menghasilkan output secara efisien (Tohir, 1993).

### **B. Tenaga kerja**

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usaha tani yang sangat tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk (Suratijah, 2009). Tenaga kerja adalah orang yang bersedia dan sanggup bekerja baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dengan tidak atau menerima upah. Tenaga kerja ini merupakan faktor yang penting dalam usaha tani, khususnya tenaga kerja petani dan anggota keluarganya (Tohir, 1983).

Tenaga kerja dalam usaha pertanian rakyat harus dibedakan dengan tenaga kerja dalam perusahaan pertanian. Dalam usaha pertanian rakyat, tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri dari ayah, istri, dan anak-anak. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian

secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang. Tohir (1983) menyatakan bahwa tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja keluarga banyak dipakai dalam usaha tani skala kecil, pembagian kerja dalam keluarga didasarkan atas tradisi dan perbedaan-perbedaan fisik.

Pemakaian tenaga kerja luar keluarga berkaitan erat dengan besarnya usaha. Setiap usaha pertama-tama mengerahkan tenaga kerja keluarga, setelah dirasa tidak mencukupi maka diambil tenaga kerja luar keluarga. Hernanto (1989) menyatakan bahwa tenaga kerja luar hanya sebagai bantuan, khususnya untuk kegiatan atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih dari potensi tenaga kerja yang dimiliki petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Mubyarto (1991), dimana dalam usaha tani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga, yang merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam uang. Usaha tani dapat sekali-kali membayar tenaga kerja tambahan (Mubyarto, 1991).

Kemampuan tenaga kerja dalam usaha tani juga dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima tenaga kerja tersebut. Menurut Hasyim (2006), tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani akan menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan yang luas untuk petani menerapkan apa yang diperolehnya untuk peningkatan usaha taninya. Mengenai tingkat pendidikan petani, dimana mereka yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Tingkat pendidikan manusia pada umumnya menunjukkan daya kreatifitas manusia dalam berfikir dan bertindak. Pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia (Kartasapoetra, 1994).

### **C. Teknologi**

Teknologi pertanian diartikan sebagai bagaimana cara penyebaran benih, pemeliharaan tanaman, memungut hasil serta termasuk pula benih pupuk, obat-obatan, pemberantasan hama, alat-alat, sumber tenaga kerja dan kombinasi jenis usaha oleh para petani dalam fungsinya selaku pengelola untuk mengambil keputusan (Suhardiyono, 1992). Menurut Husodo (2004), teknologi yang diterapkan dalam mendukung pembangunan pertanian Indonesia merupakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan mutu dan diversifikasi produk olahan di sektor hilir, baik untuk skala kecil, menengah, maupun besar. Teknologi digunakan baik pada kegiatan *on farm* maupun *off farm*. Pada kegiatan *on farm*, pemanfaatan teknologi meliputi teknologi biologis untuk menghasilkan benih, varietas unggulan termasuk penggunaan teknologi untuk pertanian organik serta pengadaan peralatan dan mesin pertanian. Sementara pada kegiatan *off farm*, teknologi

yang diterapkan meliputi teknologi pengolahan, pengawetan, pengemasan, pengepakan, dan distribusi.

Kesejahteraan petani di Indonesia masih tergolong rendah, rendahnya kesejahteraan petani karena rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan yang sempit dan sulitnya akses terhadap kredit. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan petani masih di perlukan, salah satunya adalah memperkenalkan teknologi pertanian. Dengan lahan yang sempit petani dapat meningkatkan produksi dengan mengadopsi teknologi yang di praktekan saat mengikuti pelatihan seperti, pengenalan tanaman baru, varietas yang lebih unggul, atau teknologi produksi baru. Namun demikian untuk mempercepat tingkat adopsi teknologi baru, membutuhkan pengetahuan individu petani.

#### **D. Pengolahan**

Pengolahan hasil produk pertanian dapat berupa usaha industri penggilingan gabah menjadi beras. Para pelaku usaha tersebut mempunyai peran amat penting bila ditempatkan di pedesaan karena dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian di pedesaan, dengan cara menyerap/menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Andikal dan Brotosunaryo, 2013). Pengolahan hasil pertanian dapat berupa pengolahan sederhana seperti pembersihan, pemilihan (*grading*), pengepakan atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih, seperti penggilingan (*milling*), penepungan (*powdering*), ekstraksi dan penyulingan (*extraction*), penggorengan (*roasting*), pemintalan (*spinning*), pengalengan (*canning*) dan proses pabrikasi lainnya.

Pengolahan adalah suatu operasi atau rentetan operasi terhadap suatu bahan mentah untuk dirubah bentuknya dan atau komposisinya (Helmi, 2009). Pengolahan hasil pertanian dapat membantu petani dalam meningkatkan nilai jual dari produk hasil pertanian mereka. Dampak pengolahan pertanian, memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Helmi, 2009):

1. Dapat meningkatkan nilai tambah,
2. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau dikonsumsi
3. Meningkatkan daya saing, dan
4. Menambah pendapatan dan keuntungan petani.

#### **E. Pemasaran**

Pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya individu maupun kelompok mampu mendapatkan segala hal yang mereka butuhkan dan inginkan baik berupa barang ataupun jasa dengan cara menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler dan Keller, 2007). Stanton (1993), secara

lebih formal menjelaskan bahwa pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan berbagai barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial.

Berkembangnya suatu sistem ekonomi pada sebuah negara menyebabkan semakin kompleks dan terspesialisasi proses produksi. Pusat-pusat produksi semakin terpisah dari konsumen yang berakibat pada semakin kompleksnya sistem pemasaran. Pemasaran dalam pertanian diartikan sebagai salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh para pengusaha termasuk pengusaha tani (*agribusinessman*) dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*), mendapatkan laba, dan demi berkembangnya usaha pertanian berkelanjutan. Keberhasilan usaha dibidang pertanian sangat tergantung pada keahlian dibidang pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia (Firdaus, 2010). Terdapat tiga pelaku usaha dalam penyaluran saprodi pertanian agar sampai ke tangan petani. Distributor merupakan pelaku pertama dalam penyaluran saprodi pertanian. Kegiatan utama distributor adalah melayani pengadaan pupuk oleh agen pengecer. Kedua adalah agen pengecer adalah agen resmi dan mempunyai izin usaha untuk menyalurkan pupuk kepada petani. Ketiga adalah jasa pengedar yaitu pelaku usaha penyaluran saprodi pertanian kepada para petani dengan menawarkan jasa pengadaan pupuk dan diantar sampai lokasi sawah para petani (Andikal dan Brotosunaryo, 2013).

### **2.2.5 Kelembagaan Pertanian**

Kelembagaan petani (pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan) adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. Pelaku utama yang dimaksud adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya (UU no 16 Tahun 2006), meskipun terdapat peran pemerintah dalam memfasilitasi pembentukannya. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum (UU Nomer 19 Tahun 2013). Lembaga pertanian memiliki peran dan fungsi masing-masing terhadap sistem pertanian (agribisnis). Peran kelembagaan petani yang mendukung keberlanjutan pertanian diberikan kriteria (Nurmala dkk, 2012):

1. Subsistem Sarana

Perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi yang memungkinkan penerapan suatu teknologi usaha tani dan pemanfaatan SDA secara optimal

2. Subsistem Usaha tani

Pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usaha tani pertanian rakyat maupun usaha tani besar

3. Subsistem Pengolahan

Pengolahan hasil secara sederhana di tingkat petani dan penanganan pasca panen komoditi pertanian yang di hasilkan samapai pada tingkat pengolahan lanjut selama bentuk , susunan dan citarasa komoditi tersebut tidak berubah

4. Subsistem Pemasaran

Pemasaran hasil usaha tani yang masih segar atau hasil olahannya mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran di dalam negeri dan ekspor

5. Subsistem Pelayanan atau Pendukung (Departemen Pertanian, 2011 dan Zakaria, 2003)

Jasa perbankan, jasa angkutan, asuransi, penyimpanan dan lain-lain.

Menurut Dimiyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di indonesia adalah (1) masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran, (2) belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*), (3) peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Permasalahan pada petani dan kelembagaan dapat diselesaikan dengan memaksimalkan kapasitas kelembagaan petani itu sendiri.

Kapasitas kelembagaan petani dapat tercapai dengan melihat empat indikator, yaitu (Anantanyu, 2009):

1. Tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya: adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi.
2. Fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi: adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik,

3. Adanya keinovatifan kelembagaan, meliputi: adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya pola kewenangan dalam kelembagaan, adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan, tersedia sumber-sumber pendanaan, tersedia fasilitas-fasilitas fisik, kualitas sumber daya anggota memadai, dan adanya teknologi yang sesuai.
4. Keberlanjutan kelembagaan, meliputi: sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak lain.

## 2.3 Kemiskinan

### 2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik perempuan maupun laki-laki.

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* adalah definisi yang sering digunakan dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Menurut *Chambers* (1987), kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

### 2.3.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun (2001), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan

2. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploratif intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal political fragmentation and civil stratife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International processes*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Sedangkan penyebab kemiskinan berdasarkan Bank Dunia (2005), terdiri dari:

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);

6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Studi Empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya ketrampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.
2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sumber daya alam yang rendah.
2. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
3. Sumber daya manusia yang rendah.
4. Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Berdasarkan beberapa penelitian, faktor-faktor penyebab kemiskinan yang sekaligus merupakan bentuk-bentuk kemiskinan terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasmita, 1996, Sumodiningrat, 1998, dan Baswir, 1997).

1. Kemiskinan natural

Keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik

sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita (1996) disebut sebagai “*Persisten Poverty*” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolir.

## 2. Kemiskinan kultural

Mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

## 3. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997). Selanjutnya Sumodiningrat (1998) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasmita (1996: 236) hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori-teori yang ada, Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kelembagaan yang ada di tempat tersebut. Rendahnya beberapa faktor tersebut menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima. Pendapatan yang diterima tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan. Variabel penyebab kemiskinan yang akan diteliti berdasarkan teori-teori yang ada dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

**Tabel 2.8 Variabel penyebab kemiskinan**

No.	Variabel	Sumber		
		Bank Dunia (2005)	Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995)	Ginanjari (1996)
1.	Sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya alam yang rendah</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik</li> </ul>
3.	Sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;</li> <li>• Sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)</li> <li>• Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;</li> <li>• Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja</li> <li>• Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.</li> <li>• Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.</li> <li>• Sumber daya manusia yang rendah.</li> </ul>
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (<i>good governance</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik</li> </ul>

### 2.3.3 Keterkaitan Kemiskinan dan Pertanian

Kemiskinan selalu dihubungkan dengan sektor pertanian dan pedesaan. Di negara-negara sedang berkembang, lebih dari satu milyar rakyat hidup dalam kemiskinan absolut. Di wilayah pedesaan yang miskin, pertanian memegang peranan dalam mencukupi kebutuhan (Nielsen, 1998). Menurut Todaro (1984) hampir 80% penduduk di negara-negara sedang berkembang hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Penduduk yang tinggal di pedesaan tersebut bekerja pada sektor pertanian yang meliputi 66% dari penduduk yang ada. Sebagian besar penduduk pedesaan tersebut merupakan golongan miskin. Bigsten (1994) menjelaskan bahwa sebagian orang miskin dijumpai di daerah pedesaan. Oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan pertanian mempunyai peran yang penting bagi

tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan. Menurut Sastraatmadja (2006), Petani hidup dalam suasana ketertinggalan dengan kondisi kehidupan yang mengesankan.

Di sektor pertanian, agenda pembangunan nasional selain difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesempatan kerja, inventarisasi dan ekspor, perhatian juga difokuskan pada agenda revitalisasi pertanian dan perdesaan. Selain itu, hingga saat ini sektor pertanian selain memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar juga memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan perekonomian nasional (Anugrah dan Suryani, 2007).

Berdasarkan data jumlah dan presentase penduduk miskin menurut daerah, Maret-September 2013 (BPS, 2014), 63% penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan kurang dari 57% penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal diperkotaan. Pendapatan tersebut terkait erat dengan produktivitas para petani Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif kepada petani dan tidak meratanya penguasaan asset (Berita Resmi Statistik BPS, 2014).

Konsentrasi jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 berada di wilayah Jawa. Jumlah konsentrasi penduduk miskin yang terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 5,0 juta jiwa, Jawa Barat sebanyak 4,4 juta jiwa, dan Jawa Tengah sebanyak 4,9 juta jiwa (BPS, 2014). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang (BPS, 2014). Pada 2013 lalu, penduduk miskin Kabupaten Sampang mencapai 27,08% dari 248.200 jiwa penduduk.

Berdasarkan data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2013 (BPS,2014), dapat dilihat 57,52% penduduk miskin di Kabupaten Sampang bekerja pada sektor pertanian, 23,97% belum bekerja dan hanya 18,52% penduduk miskin Kabupaten Sampang bekerja bukan pada sektor pertanian. Peran penting sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Sampang dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain dari besaran pangsa sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sampang. Sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Sampang pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,96%, khususnya tanaman bahan pangan yang memiliki presentase terbesar sebesar 36,77% (PDRB Kabupaten Sampang, 2015). Peranan bidang pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sampang dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

**Tabel 2.9 Peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sampang Tahun 2010-2014**

Keterangan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,22	31,08	31,49	29,97	31,96

Sumber: PDRB Kabupaten Sampang, 2015

Lapangan usaha sub kategori tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha kategori ini yaitu sebesar 36,77% dari seluruh nilai tambah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan subkategori tanaman pangan tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 2,32%, lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang tumbuh -2,14%.

**Tabel 2.10 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sampang Tahun 2010-2014**

No.	Sub Kategori	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	80,38	80,00	78,97	77,42	76,68
	a. Tanaman Pangan	38,31	37,55	37,59	36,77	36,77
	b. Tanaman Hortikultura	7,60	7,68	7,28	6,97	6,90
	c. Tanaman Perkebunan	13,54	13,81	13,67	13,54	13,40
	d. Peternakan	19,85	19,89	19,37	19,10	18,55
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,09	1,08	1,06	1,04	1,06
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,43	0,45	0,56	0,56	0,57
3.	Perikanan	19,18	19,55	20,48	22,02	22,75
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Sampang, 2015

## 2.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan petani tanaman pangan, pekebun, dan peternak yang ada di Desa Bira Tengah adalah sebagai berikut.

### A. Analisis Deskriptif Kuantitatif

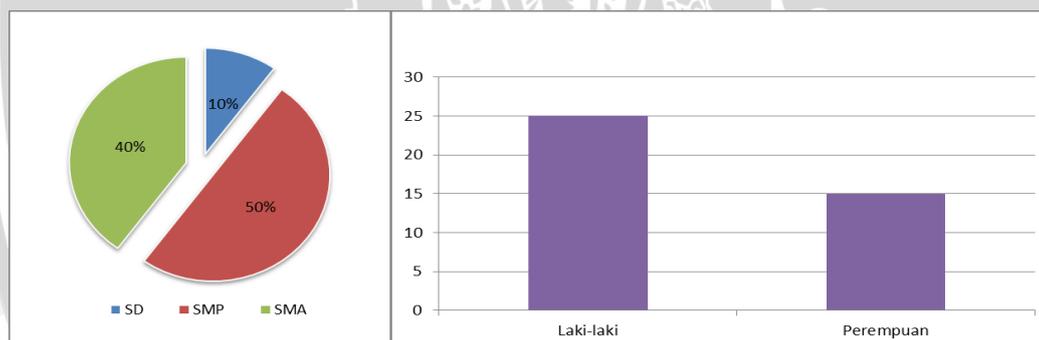
Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang bermaksud menggambarkan objek penelitian pada saat keadan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan (Siregar,2013). Menurut Sugiyono (2005) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2007), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Penyajian data dalam bentuk tabel yaitu penyajian data dengan model penyajian yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel data berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Contoh penggunaan analisis deskriptif kuantitatif dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

**Tabel 2.11 Contoh Tabel Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1.	Laki-laki	25
2.	Perempuan	15
<b>Total</b>		<b>40</b>

Berdasarkan **Tabel 2.11**, dijelaskan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang. Bentuk lain penyajian data adalah grafik atau diagram. Grafik atau diagram ini biasanya dibuat berdasarkan tabel. Contoh-contoh bentuk grafik batang dan diagram *pie chart* yang biasa digunakan dalam penyajian data penelitian kuantitatif dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



**Gambar 2.1 Contoh Penyajian Data dalam Diagram *Pie Chart* (a) dan Grafik Batang (b)**

Berdasarkan teori ini, maka metode deskriptif kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mengumpulkan data secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari objek yang diteliti kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori atau literatur yang berhubungan secara kuantitatif atau statistik. Analisis ini digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan permasalahan masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang ada di Desa Bira Tengah dengan menggunakan data statistik berupa tabel dan grafik agar data dapat dipaparkan dengan akurat.

#### **B. Analisis *Linkage System***

Analisis linkage system merupakan penelaahan hubungan secara makro dan menyeluruh dari suatu objek sebagai suatu sistem. Sistem itu sendiri adalah kesatuan dari

berbagai bagian yang saling berhubungan. Sistem tersebut digambarkan ke dalam bagan yang memperlihatkan bagian-bagian dalam sistem yaitu masukan (input) dan keluaran (output) serta hubungan antara bagian-bagian dari sistem itu (Wicaksono & Sugiarto dalam Wijaya, 2001). Dari penelaahan tersebut kemudian dapat ditemukan berbagai permasalahan dan kekurangan yang terdapat pada sistem yang menghubungkan antara setiap kegiatan pertanian yang ada, sehingga dapat ditentukan arahan pengembangannya.

Linkage system ini dapat berupa keterkaitan antara kegiatan hulu dan hilir. Berbagai teori tentang pendorong pertumbuhan daerah menekankan peranan permintaan output-output daerah dan rangkaian kegiatan atau sektor ekonomi yang mengarah ke muka (keterkaitan hilir), yaitu kaitan ke depan (forward linkage) dan kaitan ke belakang (backward linkage). Dalam analisis keterkaitan ke belakang, faktor yang diamati adalah tenaga kerja, nilai bahan baku, dan nilai peralatan. Dalam analisis keterkaitan ke depan faktor-faktor yang diamati adalah nilai produksi yang dihasilkan, dan pemasaran dari usaha tani yang ada.

### C. Analisis Diagram Venn

Diagram Venn (*institutional diagraming*) bertujuan untuk mengkaji system organisasi (*networking*) diantaranya lembaga-lembaga, tingkat kedekatan dsb (Hastuti, 2007). Informasi yang diharapkan berupa kegiatan-kegiatan, manfaat lembaga formal dan informal di dalam kehidupan masyarakat untuk dianalisis apakah lembaga tersebut membangun struktur masyarakat yang positif atau sebaliknya. Analisis kelembagaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pembuatan bagan hubungan kelembagaan yang digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada di lingkungannya. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh dan dekatnya hubungan suatu lembaga dengan masyarakat yang digambarkan melalui diagram venn (Hastuti, 2007). Tujuan dari pembuatan bagan hubungan kelembagaan, terdiri dari (Yoegiesti, 2010) :

1. Mengetahui keberadaan, manfaat dan peranan berbagai lembaga.
2. Mengetahui hubungan antar lembaga-lembaga tersebut.
3. Mengetahui keterlibatan suatu kelompok di dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

### D. Analisis Crosstab *Chi-Square*

Uji *Chi-Square* digunakan untuk menguji kebebasan antara dua sampel (variabel) yang disusun dalam tabel baris kali kolom atau menguji keselarasan dimana pengujian dilakukan untuk memeriksa ketergantungan dan homogenitas apakah data sebuah sampel

yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, uji ini dapat juga disebut uji keselarasan (*goodness of fit test*), karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis (seperti distribusi normal, uniform, binomial dan lainnya).

Pada kedua prosedur tersebut selalu meliputi perbandingan frekuensi yang teramati dengan frekuensi yang diharapkan bila  $H_0$  yang ditetapkan benar, karena dalam penelitian yang dilakukan data yang diperoleh tidak selamanya berupa data skala interval saja, melainkan juga data skala nominal, yaitu yang berupa perhitungan frekuensi pemunculan tertentu. Perhitungan frekuensi pemunculan juga sering dikaitkan dengan perhitungan prosentase, proporsi atau yang lain yang sejenis. *Chi-Square* adalah teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji probabilitas seperti itu, yang dilakukan dengan cara mempertentangkan antara frekuensi yang benar-benar terjadi, frekuensi yang diobservasi, *observe frequencies* (disingkat  $F_0$  atau  $O$ ), dengan frekuensi yang diharapkan, *expected frequencies* (disingkat  $F_h$  atau  $E$ ). Dasar pengambilan keputusan *chi square* dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan berdasarkan angka probabilitas (signifikansi):

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Atau juga dapat menggunakan pertimbangan berdasarkan Chi Square Tabel dimana:

- a. Jika nilai Chi Square Hitung  $<$  Chi Square Tabel maka  $H_0$  diterima
- b. Jika nilai Chi Square Hitung  $>$  Chi Square Tabel maka  $H_0$  ditolak

Kemudian untuk menentukan tingkat kekuatan hubungan menggunakan nilai kontingensi koefisien (*coefficient contingency*). Kategori nilai kontingensi koefisien menurut kriteria Guilford yaitu:

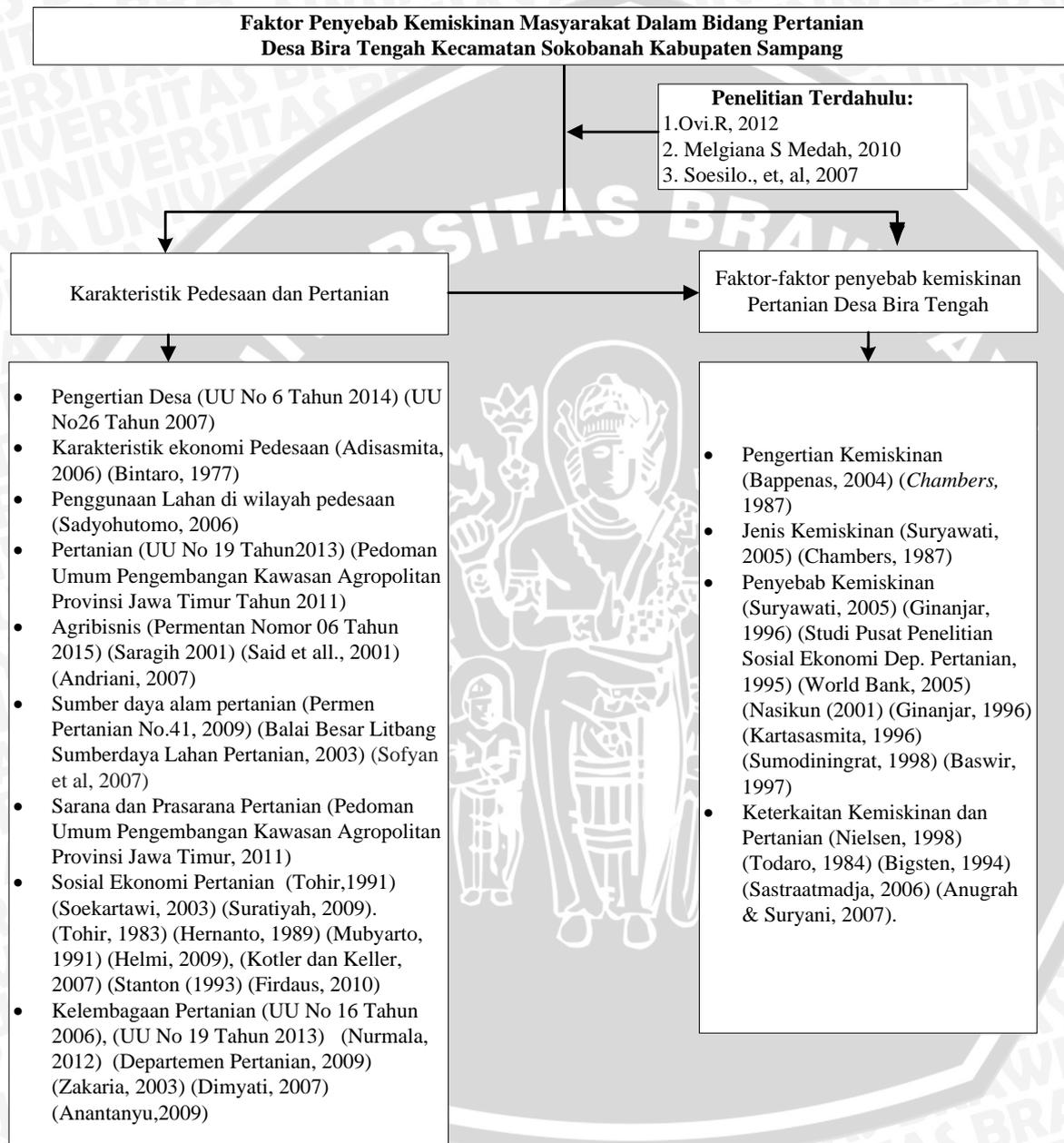
**Tabel 2. 12 Kriteria Hubungan berdasarkan Nilai Koefisien Kontingensi**

No.	Nilai	Kriteria Hubungan
1.	$< 0,2$	Hubungan Sangat Rendah
2.	$0,2 - < 0,4$	Hubungan Rendah
3.	$0,4 - < 0,7$	Hubungan Sedang
4.	$0,7 - < 0,9$	Hubungan Kuat
5.	$0,9 - < 1,0$	Hubungan Sangat Kuat

Sumber: Rakhmat, 2009

## 2.5 Kerangka Teori

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam setiap rumusan masalah pada penelitian “Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Bira Tengah Kabupaten Sampang” dapat dilihat pada **Gambar 2.4**.



**Gambar 2.2 Kerangka Teori**

## 2.6 Studi Terdahulu

**Tabel 2.13 Studi Terdahulu Terkait Kemiskinan Pertanian**

No.	Judul	Tujuan	Variabel	Analisis	Hasil	Manfaat	Perbedaan
1.	Pengembangan Daerah Tertinggal (Underdevelopment Region) Di Kabupaten Sampang (Ovi.R, 2012)	• Menangani permasalahan daerah tertinggal di Kabupaten Sampang melalui arahan pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Sampang.	• Kemiskinan	• Analisis cluster untuk tipologi daerah tertinggal, • Analisis AHP (menentukan program-program prioritas pengembangan daerah tertinggal) • Analisis deskriptif (merumuskan arahan pengembangan daerah tertinggal)	• Tipologi daerah tertinggal: daerah yang sedang menuju ketertinggalan, dan daerah tertinggal yang didasarkan atas aspek ekonomi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur. • Program-program prioritas pengembangan daerah tertinggal,	• Tinjauan pustaka menjadi acuan dalam studi penelitian yang akan dilakukan dalam memperkuat teori • Hasil identifikasi daerah tertinggal digunakan dalam menganalisis kemiskinan yang ada	• Studi yang dilakukan membahas kemiskinan berdasar indikator-indikator yang ada, sedangkan studi yang akan dilakukan hanya sebatas indikator kemiskinan pendapatan dan dalam lingkup desa
2.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Petani (Suatu Kasus Di Kecamatan Kupang Timur – Kabupaten Kupang) Nusa Tenggara Timur	• Mendeskripsikan karakteristik petani miskin di Kecamatan Kupang Timur. • Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan petani di kecamatan Kupang Timur.	• Kualitas desa • Sumber daya manusia • ekonomi • hubungan kerja nelayan • kelembagaan	• Analisis jalur, yaitu pendekatan untuk model hubungan explanatory antara variabel-variabel yang dapat diobservasi	• Faktor penyebab kemiskinan desa • Bentuk kemiskinan desa	• Variabel sumber daya manusia dan kelembagaan digunakan sebagai acuan pada penelitian yang akan dilakukan.	• Studi yang akan dilakukan menganalisis secara kuantitatif dengan chi-square dan variabel yang digunakan lebih beragam. Pada penelitian sebelumnya hanya sebatas sosial dan ekonomi.
3.	Penyebab Kemiskinan Masyarakat Tani (Studi Di Dusun Ngebrong, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) (Soesilo., et al, 2007)	• Meemahami penyebab kemiskinan masyarakat tani dan rekomendasi menanggulangi kemiskinan masyarakat tani	• Produksi, konsumsi dan distribusi pertanian	• Analisis data model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan	• Faktor penyebab kemiskinan • Rekomendasi penanggulangan kemiskinan	• Rekomendasi penanggulangan kemiskinan pedesaan	• Studi yang dilakukan menganalisis secara kuantitatif, sedangkan penelitian sebelumnya hanya kualitatif dan deskriptif saja.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

